



RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN
2025

INSPEKTORAT
KABUPATEN
BOGOR



Jl. Indah No.1 Cibinong ☎ 021-8756565

📧 Inspektoratkabbogor ✉ Inspektorat@bogorkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja ini merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas guna meningkatkan pelayanan publik serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada.

Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini kami susun dengan berlandaskan pada hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi saat ini. Renja ini memiliki fokus utama pada peningkatan kualitas pengawasan internal, pengendalian keuangan, serta pencegahan korupsi dan penyimpangan administrasi.

Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas sangat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur Inspektorat melalui program pelatihan dan pengembangan. Kami juga akan terus berupaya menjalin kerjasama yang sinergis dengan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan bersama.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan kepercayaan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor. Semoga Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini dapat menjadi landasan kuat bagi upaya bersama dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih baik.

INSPEKTUR



SIGIT WIBOWO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197201081997031006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan	11
Bab II. Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun 2023	13
2.1. Capaian Kinerja Inspektorat	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat... ..	42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor	47
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	60
Bab III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor	65
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	70
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	72
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat	74
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.....	74
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan RKPD Tahun 2025.....	78
Bab V. Penutup	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	17
Tabel 2.2. Hasil Pencapaian Dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2023	42
Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2023	43
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bogor	53
Tabel 2.5. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bogor	62
Tabel 3.1. Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	66
Tabel 3.2. Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	67
Tabel 3.3. Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional	69
Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025	71
Tabel 3.5. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	73
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	79



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Kebijakan ...

20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II
KEDUDUKAN DAN MUATAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan bidang urusan.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- (3) Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.
- (4) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
- b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
- c. pendanaan dan sumber pendanaan.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025

Pasal 5

- (1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan
 - c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
- b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
- c. penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.
- (4) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI BOGOR,



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG : RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025

RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025, Renja Inspektorat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, ataupun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2024-2026.

Selain itu, Renja Inspektorat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama, baik dalam periode pembangunan jangka panjang, RPJPD 2025-2045, maupun periode pembangunan jangka menengah 2025-2029, yang penyusunannya dilakukan secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Proses sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, tidak hanya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pengawasan di Kabupaten Bogor, tapi juga bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rumusan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja serta sumber pendanaan, yang tertuang dalam

Renja Inspektorat ini, diharapkan telah sinergi antar dokumen perencanaan, baik di tingkat Kabupaten Bogor, maupun antar tingkatan pemerintahan.

Secara teknis, penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 tetap mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renja perangkat daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Nomor 30 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja perangkat daerah memuat evaluasi kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L.

Dalam penyusunannya, Renja Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan representasi dari pelaksanaan pendekatan perencanaan partisipatif, teknokratik, politis, bottom-up dan top-down yang disinergikan dengan kebijakan dan target kinerja/prioritas pembangunan pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan hingga akhir periode, diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Secara umum, mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, mengingat penyusunan Renja masih berpedoman pada Pasal 125-143 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renja

Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bogor. Setelah dibentuk tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya disusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap persiapan penyusunan Renja Inspektorat ini dilakukan pengumpulan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2025.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Tahap penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Selain berpedoman pada dokumen Renstra, juga berpedoman pada evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan Renja

Pada tahap penyusunan Rancangan Renja ini, dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja PD yang selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah'/Lintas Perangkat Daerah. Penghitungan ulang kebutuhan wajib dan mengikat Inspektorat Kabupaten Bogor yang sudah di verifikasi oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor juga dilakukan pada tahap ini.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk perencanaan Tahun 2025 merupakan salah satu tahapan yang ditempuh oleh perangkat daerah dalam rangka membahas dan menyempurnakan substansi rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang pada awalnya berupa pendekatan teknokratik, dipadupadankan dengan usulan-usulan yang berasal dari pendekatan partisipatif, top-down dan bottom up, dengan tetap mempertimbangkan sinergi dan target prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2025. Secara vertikal. Forum Perangkat Daerah juga merupakan wadah untuk menguatkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini merupakan bahan untuk penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja PD untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025. Pada tahap penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat ini, dilakukan kompilasi dan menyusun pemeringkatan prioritas kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil Forum Perangkat Daerah.

6. Penetapan Renja

Pada tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah ini dilakukan penajaman terhadap program, kegiatan, dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi Final Renja Perangkat Daerah dan akan menjadi

pedoman dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Inspektorat Tahun 2025. Seluruh tahapan penyusunan Renja PD dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, melalui program dan kegiatan yang tentunya selaras dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan pula kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di daerah. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dimana prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2025 yang terkait langsung dengan Inspektorat adalah **Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi** yang mengarah pada fokus/sasaran pembangunan daerah yaitu **Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** dimana hal ini tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025. Pencapaian target sasaran daerah (IKU) Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026. Tujuan Inspektorat adalah “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah” dengan indikator Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Sangat Baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sasaran Inspektorat adalah:

1. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Meningkatnya Maturitas Manajemen Resiko;
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP; dan
4. Meningkatnya Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Di samping berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 juga

memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan dengan cara menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 juga memperhatikan dan mempedomani Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat sehingga dapat bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dengan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi , kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2021 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

- Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 88);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
 36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
 37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026; dan

38. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam mencapai target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah Tahun 2025.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Tahun 2025.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat dan capaian Renstra Inspektorat sampai dengan tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat serta rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Pada bab ini menjelaskan Rencana Kerja serta Pendanaan Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2024-2026 dan RKPD tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai catatan penting yang perlu menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA tahun anggaran 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT

TAHUN 2023

2.1. Capaian Kinerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Sebagaimana amanat PP Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, proses evaluasi harus dilakukan pada Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2023, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : kebijakan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Adapun penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
4. Kebijakan sekaligus unit pelaksana untuk melaksanakannya.

Tujuan strategis yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yaitu **Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** dengan Sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka pada tahun 2023 telah dilaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 48 sub kegiatan (sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) dengan pagu Belanja sebesar Rp 42.225.945.132,- (Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Pagu anggaran ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 41.627.118.687,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 598.826.445,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan tahun 2023 sebesar Rp 41.250.529.729,- (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 97,69%, dari target anggaran. Dengan Realisasi anggaran tersebut, pencapaian indikator tujuan Inspektorat yaitu “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” adalah Level 2 dari target Level 3

atau tingkat capaian 66,67%. Realisasi tujuan strategis Inspektorat pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Perangkat Daerah masih belum mempedomani dan menyelenggarakan SPIP secara memadai;
2. Masih banyaknya kerugian Daerah yang belum dikembalikan ke Kas Daerah, terlihat dari masih besarnya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti; dan
3. Adanya peraturan yang baru mengenai SPIP Terintegrasi (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021).

Upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor untuk meningkatkan capaian Maturitas SPIP pada Tahun 2025 adalah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP di setiap Perangkat Daerah (PD) yang meliputi: sosialisasi SPIP, bimbingan teknis dan evaluasi SPI secara terjadwal. Harapannya agar dapat meminimalisir kecurangan dan dapat mendeteksi secara dini jika terjadi pelemahan terhadap SPI. Dengan demikian bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan yang berdampak pada hasil audit dari pihak eksternal.

Sementara itu, target kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bogor telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Renstra Tahun 2018-2023. Capaian masing-masing sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, realisasi sasaran 1 ini sesuai dengan target yang diinginkan dimana target pada Tahun 2023 yaitu Level 3. Capaian realisasi Tahun 2023 ini sama dari realisasi pada Tahun 2021 dan 2022 dan sudah memenuhi target pencapaian pada periode akhir RPJMD Tahun 2018-2023. Jika dibandingkan dengan target nasional, berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.11/S-25/D3/04/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Target Kinerja, Pelaksanaan KF 1 PKP2T Perwakilan BPKP dan Kebijakan Pembinaan Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 menetapkan bahwa Target APIP Nasional adalah Level 3, sehingga realisasi APIP Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun 2023 sudah “Tercapai”.

2. Level Maturitas Manajemen Risiko

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bogor yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 salah satunya adalah pencapaian nilai maturitas manajemen risiko. Pada Tahun 2023, target maturitas manajemen risiko Kabupaten Bogor berada pada Level 2. Berdasarkan hasil penilaian dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, realisasi nilai maturitas manajemen risiko Kabupaten Bogor terealisasi sebesar 2,539 atau berada pada level 2 atau sama dengan realisasi Tahun 2021 dan 2022.

Rata-rata tingkat capaian kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2023 sebesar 100% sehingga dapat dilihat bahwa capaian program sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

URUSAN / UNSUR
 BIDANG URUSAN
 PERANGKAT DAERAH

: UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
 : INSPEKTORAT DAERAH
 : INSPEKTORAT

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
40	01	11		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Wilayah Kerja I	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	%	25						
			0001	Pengawasan Internal secara Berkala di Wilayah Kerja I	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas OPD	Dok	21						
			0005	Audit Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana Non APBD Kabupaten Bogor Wilayah Kerja I		Dok	1						
			0006	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di lingkup Desa Wilayah Kerja I	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas	Dok	30						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
40	01	12		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Wilayah Kerja II	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	%	25						
			0001	Pengawasan Internal secara Berkala di Wilayah Kerja II	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas OPD		21						
			0005	Audit Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana Non APBD Kabupaten Bogor Wilayah Kerja II	Jumlah LHP Berkala		1						
			0006	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di lingkup Desa Wilayah Kerja II	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas		30						
40	01	13		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Wilayah Kerja III	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	%	25						
			0001	Pengawasan Internal secara Berkala di Wilayah Kerja III	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas OPD		21						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
			0005	Audit Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana Non APBD Kabupaten Bogor Wilayah Kerja III	Jumlah LHP Berkala		1						
			0006	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di lingkup Desa Wilayah Kerja III	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas		30						
40	01	14		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Wilayah Kerja IV	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	%	52						
			0001	Pengawasan Internal secara Berkala di Wilayah Kerja IV	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas OPD		21						
			0005	Audit Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana Non APBD Kabupaten Bogor Wilayah Kerja IV	Jumlah LHP Berkala		1						
			0006	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di lingkup Desa Wilayah Kerja IV	Jumlah LHP Berkala		30						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
40	01	15		Program Fasilitas Pengaduan Masyarakat Wilayah Kerja I	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	32						
			0001	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Wilayah Kerja Irban I	Terselesaikannya Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah		31						
			0002	Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik Wilayah Kerja Irban I	Terlaksananya Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik di Wilayah Kabupaten Bogor		1						
40	01	16		Program Fasilitas Pengaduan Masyarakat Wilayah Kerja II	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	30						
			0001	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Wilayah Kerja Irban II	Terselesaikannya Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah		29						
			0002	Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik Wilayah Kerja Irban II	Tertanganinya Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik di Wilayah Kabupaten Bogor		1						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
40	01	17		Program Fasilitas Pengaduan Masyarakat Wilayah Kerja III	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	8						
			0001	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Wilayah Kerja Irban III	Terselesaikannya Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah		7						
			0002	Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik Wilayah Kerja Irban III	Tertanganinya Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik di Wilayah Kabupaten Bogor		1						
40	01	18		Program Fasilitas Pengaduan Masyarakat Wilayah Kerja IV	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	31						
			0001	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Wilayah Kerja Irban IV	Terselesaikannya Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Dok	30						
			0002	Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik Wilayah Kerja Irban IV	Terlaksananya Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik di Wilayah Kabupaten Bogor	Dok	1						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
40	01	19		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban I	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal "B"	Predikat	B						
			0001	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Kerja Irban I	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas PD	Dok	1						
40	01	20		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban II	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal "B"		-						
			0001	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Kerja Irban II	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas PD		-						
40	01	22		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Wilayah Kerja Irban IV	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal "B"		-						
			0001	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Kerja Irban IV	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas PD		-						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
40	01	23		Program Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irbn I	Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Dok	1						
			0001	Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irbn I	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan		1						
40	01	24		Program Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irbn II	Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Dok	1						
			0001	Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irbn II	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan	Dok	1						
40	01	25		Program Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irbn III	Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Dok	1						
			0001	Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irbn III	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan		1						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
40	01	26		Program Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irban IV	Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Dok	1						
			0001	Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan Wilayah Kerja Irban IV	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan		1						
40	01	27		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Negara	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	3						
			0001	Pelatihan Pengawasan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level	3						
40	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang dilayani	%	305						
			0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air listrik dan internet - Telepon - Air - Listrik - Internet	Jar	6						
			0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional - Kendaraan Roda 2 (12 unit)	Dok	28						

					- Kendaraan Roda 4 (14 unit)							
		0003		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	Bln	12					

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
				REALISASI				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
	0021	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	Jns	16					
	0022	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Barang cetakan: - Penggandaan :	Jns	21					
	0023	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jns	6					
	0024	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan - Surat Kabar - Majalah - Buku Peundang-undangan	Jns	6					
	0025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah isi ulang tabung pemadam Kebakaran	Kali	96					
	0026	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan dan minum - Rapat - Tamu	Bln	12					

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0027	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi yang dilaksanakan - Perjalanan dalam Daerah - Perjalanan Dalam Daerah	hari	138					
	0004	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	Bln	12					
	0041	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan Arsip SKPD	Dok	2					
	0042	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	Dok	6					
	0043	Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang - RTBU - Adm Barang - KIB Semesteran	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	Dok	4					
	0044	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah piket keamanan kantor	Bln	12					

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100						
	0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	stel	104						
40	01	04								
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang di Tingkatkan	%	100					
	0001	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	Org	12					
	0002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi Per UU	Org	76					
40	01	05								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan	%	100					
	0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP dan LKPJ	Dok	2					
	0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Dok	2					

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
	0003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dok	1						
	0004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Dok	2						
		- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD								
	0005	Penatausahaan Keuangan SKPD	Dok	1						
		Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD								
	0007	Publikasi Kinerja SKPD	Thn	1						
		Publikasi kinerja SKPD di media								
	0008	Penyusunan Renstra SKPD	Dok	1						
		Jumlah dokumen Renstra yang tersedia								
	0009	Penyusunan Renja SKPD	Dok	1						
		Jumlah Dokumen Renja yang tersedia (dok)								

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	05	01	21	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Wilayah Kerja I,II,III,IV	Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%		86					
					Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Min. B	%		100					
			0001	Pengawasan Internal secara Berkala di Wilayah Kerja I,II,III,IV	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas OPD	Dok		224					
			0002	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di lingkup Desa Wilayah Kerja I,II,III,IV	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas	Dok		160					
			0003	Audit Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana Non APBD Kabupaten Bogor Wilayah Kerja I,II,III,dan IV		Dok							
			0004	Review Laporan RKPD, KUA PPAS, dan Review RKA Pemerintah Daerah Wilayah Kerja I,II,III dan IV	Jumlah Laporan Review, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok		1					
			0005	Penanganan Kasus Pengaduan Lingkungan Pemerintah Daerah	Terselesaikannya Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Kasus		30					
			0006	Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik	Jumlah Pengawasan/Audit Tematik - Audit Pasos Pasum - Audit Asset	Dok		1					

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	05	01	23	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Proses peningkatan akuntabilitas kinerja yang terfasilitasi	Kegiatan		5					
			0001	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Temuan yang sudah ditindaklanjuti	Dok		3					
			0002	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terselesaikannya Temuan Hasil Pengawasan	Dok		2					
			0003	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Secara Online	Terlaksananya Penilaian Birokrasi Secara Online	Dok		1					
			0004	Monitoring dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Monev Perangkat Daerah	Dok		1					
			0005	Pelatihan Pengawasan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas Tenaga Pengawas								
			0006	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terarahnya Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengawas	Dok		3					
01	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%		75					
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai	%		100					
					Persentase Perencanaan sesuai target	%		100					
					Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	%		100					
					Persentase Pelayanan Kepegawaian	%		100					

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
	0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayarkan	Bulan		12				
	0002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Dok		75				
	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Tabung Pemadam Kebakaran, Tabung Gas	Bln		12				
	0004	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang diberi Jamuan Makanan dan Minuman	Bln		9				
	0051	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Arsip yang ditata	Dok		3				
	0052	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	Bln		12				
	0053	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayar, Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang tersedia	Bln		12				
	0054	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar Pajaknya - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan roda 2	Unit		22				
	0207	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bln		9				
	0354	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Bln		9				

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0355	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang Terpelihara	Dok	2					
	0356	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Dok	6					
	0450	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Dok	4					
	1000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	Bln	12					
	1003	Pengelolaan Adminstrasi Kepagawiaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawiaian	Dok	3					
	1004	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan	Orang	20					
	2001	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	2					
	2002	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan SKPD	Dok	31					
	2003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP dan LKPJ	Dok	3					
	2004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	- Tersedianya Dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P '- Tersedianya Dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahunan	Dok	4					
	2005	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang tersedia	Dok	2					
	2008	Publikasi Kinerja SKPD	Publikasi Kinerja SKPD di Media	Tahun	1					

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
06	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%			100	100	100	100	100%
			2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHP yang Diterbitkan	Dokumen			665	637	894	894	100%
			01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan			12	8	1	1	100%
			02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan			178	156	42	42	100%
			03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan			6	4	2	2	100%
			04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Laporan			9	9	430	430	100%
			05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan			416	416	375	375	100%
			06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan			40	40	40	40	100%
			07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen			4	4	4	4	100%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHP yang Diterbitkan	Dokumen			64	64	64	64	100%
			01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan			20	20	20	20	100%
			03	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan			44	44	34	34	100%
06	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen			2	2	2	2	100%
					Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%			100	100	100	100	100%
			2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis yang Diterbitkan	Dok			7	7	4	4	100%
			01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi			5	5	3	3	100%
			02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi			2	2	1	1	100%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.02	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan Reviu yang Terbit	Dok			11	11	153	153	100%
			01	Pendampingan, Asistensi, Verifikaksi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD			4	4	73	73	100%
			02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan			2	2	2	2	100%
			03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD			5	5	78	78	100%
													100%
06	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%			100	100	100	100	100
			2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	dok			9	12	13	13	100
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Renstra yang Tersusun	Dok			4	3	4	4	100
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok			1	1	1	1	100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
						1					
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok			1	1	1	1	100
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok			1	1	1	1	100
	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok			1	1	1	1	100
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok			5	4	4	4	100
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok			1	1	1	1	100
	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun dengan Baik	Dokumen			14	6	6	6	100
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan			14	14	14	14	100
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok			49	49	49	49	100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok			1	1	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok			1	1	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dok			14	14	14	14	100
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok			1	1	1	1	100
										100%
2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	dok			19	19	19	19	100
	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok			4	4	4	4	100
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok			15	15	15	15	100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan aparatur terlaksana dengan baik	Jenis Peayanan		4	4	4	4	100
		02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Stel		580	91	91	91	100
		03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Daftar Urut Kepangkatan, Jumlah Dokumen Data APIP, Jumlah Dokumen Data Pensiun, Jumlah Dokumen DUPAK Auditor, Jumlah Dokumen DUPAK P2UPD, Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat, Laporan Administrasi Kepegawaian SKP	Dokumen		9	9	9	9	100
		09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		20	20	20	20	100
		11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		90	90	91	91	100
	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	Jenis		8	8	8	8	100
		01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis		1	1	1	1	100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tahun			1	1	1	1	100
	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun			1	1	1	1	100
	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis			2	2	2	2	100
	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	buku			30	30	0	0	100
	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan			12	12	12	12	100
	10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Tahun			1	1	1	1	100
	11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tahun			1	1	1	1	100
	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	Jenis Pelayanan			5	3	3	3	100
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan jabatan	unit			1				
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional lapangan	unit			5				
	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			36	52	10	10	100
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			73	92	17	17	100
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap lainnya yang disediakan	unit			41	14	16	16	100%

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jenis Pelayanan		3	3	3	3	100
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun		1	1	1	1	100
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan		12	12	12	12	100
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan		12	12	12	12	100
	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah	Jenis Pelayanan		3	3	3	3	100
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		56	32	32	32	100
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahun		1	1	1	1	100
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung		3	3	3	3	100

Dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Bogor pada periode pemerintahan tahun 2018-2023, diwujudkan dalam bentuk Program Pancakarsa dimana Inspektorat Kabupaten Bogor dalam hal ini tidak mendukung langsung kinerja politis kepala daerah (Pancakarsa) tersebut.

Tabel 2.2
Hasil Pencapaian Dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2023

PANCAKARSA	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME (TAHUN 2019)			VOLUME (TAHUN 2020)		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5) X 100%	8	9	10 = (9/8) X 100%
TIDAK ADA									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/Standar Nasional untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU)/Muatan Lokal, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Penunjang dengan bidang urusan Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Bogor, meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat didalamnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini.

TABEL 2.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2023

URUSAN : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	TUJUAN								
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	%	80	80					
	SASARAN								
1	Level Maturitas SPIP	Level	3	3					
2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3					
	TUJUAN								
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level			3	3	3	2	66,67
	SASARAN								
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level			3	3	3	3	100
2	Level Maturitas Manajemen Resiko	Level			2	2	2	2	100

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.3 terlihat bahwa indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bogor belum mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu rata-rata tingkat capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2023 sebesar 88,89%. Akan tetapi secara keseluruhan target indikator tersebut dapat dikatakan “Baik” yaitu capaiannya rata-rata > 75,00 – 89,99%.

1. **Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),**

dimana sasaran bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pencapaian indikator tujuan Inspektorat yaitu “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” adalah Level 2 dari target Level 3 atau tingkat capaian 66,67%. Realisasi ini turun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu Level 3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut, diantaranya adalah:

- a. Perangkat Daerah masih belum mempedomani dan menyelenggarakan SPIP secara memadai;
- b. Masih banyaknya kerugian Daerah yang belum dikembalikan ke Kas Daerah, terlihat dari masih besarnya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti; dan
- c. Adanya peraturan yang baru mengenai SPIP Terintegrasi (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021).

2. **Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),**

dimana sasaran ini merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Sasaran ini memiliki target indikator kinerja Level Kapabilitas APIP level 3. Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.09.03/S 822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, realisasi kapabilitas APIP Kabupaten Bogor mendapatkan Skor : 3.210 (Level 3) atau disebut Integrated.

Level Kapabilitas APIP Level 3 disebut Integrated, menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, realisasi sasaran 1 ini sesuai dengan target yang diinginkan dimana target pada Tahun 2023 yaitu Level 3. Capaian realisasi Tahun 2023 ini sama dari realisasi pada Tahun 2021 dan 2022.

3. **Level Maturitas Manajemen Risiko**, dimana target maturitas manajemen risiko Kabupaten Bogor berada pada Level 2. Berdasarkan hasil penilaian dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, realisasi nilai maturitas manajemen risiko Kabupaten Bogor terealisasi sebesar 2,539 atau berada pada level 2 atau sama dengan realisasi Tahun 2021 dan 2022. Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2023 sebesar 100% dan masuk dalam kategori Sangat Baik dan memenuhi target akhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023. Peningkatan realisasi terjadi pada Tahun 2021 yaitu dari target pada Level 1 terealisasi pada Level 2 sehingga pencapaian pada Tahun 2021 naik sebesar 200%, begitu juga realisasi pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target nasional, Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor:

PE.11/S-25/D3/04/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Target Kinerja, Pelaksanaan KF 1 PKP2T Perwakilan BPKP dan Kebijakan Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 menetapkan bahwa Target Manajemen Risiko Nasional adalah Level 2, sehingga realisasi Maturitas Manajemen Risiko Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun 2023 sudah “Tercapai”.

Sementara itu, capaian program Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, Program tersebut dilaksanakan oleh Irban I, II, III, IV dan V dengan indikator sasaran (*outcome*) adalah “Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”. Tingkat Capaian Kinerja program ini pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan Tingkat Capaian Anggaran sebesar 86,97% dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Dimana dari target 948 dokumen hasil pengawasan yang direkomendasikan sudah ditindaklanjuti semuanya. Capaian sasaran ini sama dengan capaian pada Tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 100%. Capaian indikator kinerja pada sasaran Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2023 juga telah memenuhi target akhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 yaitu sebesar 100%.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, Program tersebut dilaksanakan oleh Irban I,II,III, IV dan V dengan indikator sasaran (*outcome*) adalah “Persentase pendampingan dan asistensi yang dapat diselesaikan”. Tingkat Capaian Kinerja program ini pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan Tingkat Capaian Anggaran sebesar 97,49 % dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Dimana dari target 157 dokumen kebijakan teknis dan hasil evaluasi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dapat diselesaikan semua. Capaian sasaran ini sama dengan capaian pada Tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 100%. Capaian indikator kinerja pada

sasaran Tersedianya Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Tahun 2023 juga telah memenuhi target akhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 yaitu 100%.

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan 34 Sub Kegiatan , Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dengan indikator sasaran (*outcome*) adalah “Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Inspektorat)”. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan dilaporkan dengan baik sehingga realisasi dari indikator ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan Tingkat Capaian Anggaran sebesar 98,49%., sehingga capaian yang didapat adalah 100% dengan kategori sangat baik. Realisasi ini sama dengan realisasi Tahun 2021 dan 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor selama tahun anggaran 2023, bahwa hampir seluruh objek pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor masih memerlukan banyak pembenahan dan perbaikan. Hal tersebut terlihat pada hasil-hasil pengawasan baik yang berbentuk pemeriksaan ataupun monitoring dan evaluasi yang menunjukkan adanya temuan/permasalahan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahan-klemahan yang terjadi disebabkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada tiap-tiap satuan kerja belum berjalan dengan baik. Pengendalian intern perlu dilakukan secara dini untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Selain itu pengendalian intern yang baik akan membantu setiap satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain permasalahan diatas, terdapat Permasalahan di internal Inspektorat yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan) seiring beban kerja tugas pokok dan fungsi yang bertambah. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kendaraan operasional lapangan yang usianya sudah cukup tua dan kurang layak pakai. Hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran ketika melakukan pemeriksaan ke seluruh Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Bogor.

Adapun tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme penyusunan anggaran yang belum maksimal untuk mendukung terselenggaranya pengawasan yang profesional.
- b. Revisi Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat sebagai dampak dari kondisi sosial, ekonomi, politik yang belum stabil dan susah diprediksi.
- c. Ketidakseimbangan antara sumber daya manusia profesional yang tersedia dengan kebutuhan penanganan objek yang harus diperiksa.
- d. Kurangnya kesadaran pelaku pembangunan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada baik kepatuhan terhadap aturan.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan, dengan klasifikasi sampai dengan

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah, di atas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), dan di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- b. Paradigma tuntutan masyarakat di era otonomi daerah yang telah diakomodir kedalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah pula meningkatkan peran Inspektorat/APIP dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.
- c. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan melalui diklat, Bimtek fungsional dan substantive yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, BPK, BPKP dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d. Menjalin koordinasi dengan setiap PD dan Desa dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, mempunyai ugas dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Bogor tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten Bogor (*welfare state*). Berdasarkan analisis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi SPIP Terintegrasi (SPIP, Manajemen Risiko, Kapabilitas APIP, IEPK);
2. Kualitas dan Kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya; dan
3. Sarana dan Prasarana belum memadai.

Isu strategis yang patut diangkat dalam Renja Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2025 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya antara lain:

1. Optimalisasi Implementasi SPIP Terintegrasi (SPIP, Manajemen Risiko, Kapabilitas APIP, IEPK) pada Pemkab Bogor;
2. Penguatan Sumber Daya Manusia; dan
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi aspek identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan untuk PD yang bersangkutan, Proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perlu dilakukan secara komprehensif dan objektif. Metode yang digunakan dapat mencakup:

1. Analisis Kebutuhan: Melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga penelitian, ahli, dan masyarakat dalam mengidentifikasi serta mengumpulkan data terkait kebutuhan masyarakat. Metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai isu-isu yang harus diatasi dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan realitas.
2. Penilaian Konsistensi: Proses ini melibatkan perbandingan antara prioritas pembangunan yang diusulkan dalam Rancangan Awal RKPD dengan temuan hasil analisis kebutuhan. Poin-poin konsistensi dan diskrepansi harus diidentifikasi dengan jelas untuk mengukur sejauh mana Rancangan Awal RKPD mencerminkan kebutuhan yang telah diidentifikasi.
3. Pengukuran Dampak: Melibatkan proses mengukur dampak dari program-program yang diusulkan dalam Rancangan Awal RKPD terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan harus dinilai untuk memastikan bahwa program-program tersebut efektif dalam memecahkan masalah yang ada.

Berdasarkan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, beberapa temuan mungkin dapat diidentifikasi, yaitu adanya perubahan / review terhadap program dan rancangan awal RKPD dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Tahun 2025 antara lain disebabkan karena :

- a) Adanya beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang baru.
- b) Pelaksanaan SIPD-RI yang belum stabil dan masih berubah ubah di dalam aplikasinya.

- c) Adanya penambahan sub kegiatan baru sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Tahun 2025.
- d) Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6123 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka :
1. Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan, asistensi, konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
 2. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*). Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 terkait pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Review rancangan awal rencana kerja Inspektorat dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal rencana kerja tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Tahun 2025. Untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dalam penganggaran tahun 2025, yang berakibat terdapat beberapa perubahan indikator, target capaian serta pagu indikatif sebagaimana hasil review yang disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025 KABUPATEN BOGOR

URUSAN : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

NO					RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	%	100	4.115.271.623	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	%	100	2.585.798.288	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	565	3.437.815.255	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	800	2.205.170.038	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	8	233.879.305	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	113.397.563	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	umlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	84	.277.096.843	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	719.581.675	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Bogor	umlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	249.648.883	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	140.558.325	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	9	371.602.330	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	296.486.600	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	416	1.016.535.174	Pengawasan Desa	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	788.975.250	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Bogor	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	91.800.896	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Bogor	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	73.374.075	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	197.251.824	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	72.796.550	

NO					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING																																																						
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)																																																					
1					2						3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14				
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Laporan	64	677.456.368	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Laporan	54	380.628.250																																																						
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	16.515.758	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	28.854.000																																																						
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	44	660.940.610	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	34	351.774.250																																																						
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen	2	2.860.695.526	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen	2	1.140.125.645																																																						
							Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%	100				Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%	100																																																							
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	7	1.073.420.849	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	17	255.112.125																																																						
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	137.181.979	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	161.431.575																																																						
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	936.238.870	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	13	93.680.550																																																						
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Laporan reviu yang terbit	Laporan	6	1.787.274.677	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Laporan reviu yang terbit	Laporan	104	885.013.520																																																						
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	72	41.889.045	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	76	53.221.320																																																						
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Bogor	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	1.696.879.454	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Bogor	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	803.986.950																																																						

NO					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	72	48.506.178	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	27.805.250	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	42.358.678.646	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terfasilitasinya Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	44.099.186.639	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD	Dokumen	13	1.000.340.393	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD	Dokumen	15	651.910.432	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	182.434.890	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	143.891.625	
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	48.387.323	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	25.349.000	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	44.473.083	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	22.662.675	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	45.740.547	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	24.630.550	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	49.045.453	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	22.911.975	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	43.467.171	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	58.255.650	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	586.791.926	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	329.849.807	
6	01	01	2.01	0008							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kel.Tengah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	24.359.150	

NO					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING																																																						
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)																																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14				
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Laporan	6	36.444.139.052	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Laporan	66	38.255.436.259																																																					
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	95	36.209.694.719	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	96	38.024.143.659																																																					
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	66.891.363	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	77.168.625																																																					
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	46.591.628	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	57.548.500																																																					
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	33.337.948	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	28.886.450																																																					
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	54.952.162	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	43.218.700																																																					
6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	32.671.232	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	24.470.325																																																					
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	19	24.373.670	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Layanan Administrasi Barang	Layanan	2	48.786.038																																																					
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.102.483	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	30.372.657																																																					
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	14.271.187	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	18.413.381																																																					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING			
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6	01	01	2.05													
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel.Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	173.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel.Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40	11.960.000
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	110.194.505	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	113.554.277
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel.Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	1.100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel.Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	210.000.000
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90	728.885.905	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	915.475.309
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	Layanan	7	629.991.891	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	656.456.415
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.044.768	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33.434.371
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.305.188	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	103.323.439
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	31.994.160	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	43.402.300
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel.Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	32.685.675	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel.Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	41.552.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	121.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	152.100.000
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	381.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	269.290.000
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8.262.100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.354.305

NO					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Layanan pengadaan barang	Layanan	2	222.145.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Layanan pengadaan barang	Layanan	4	1.230.179.202	
6	01	01	2.07	0002							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	642.976.380	
6	01	01	2.07	0005							Pengadaan Mebel	Kel.Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	17	117.657.004	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	8.800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	285.358.440	
6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	13	213.345.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	19	184.187.378	
6	01	01	2.07	0009							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0	-	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Tengah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	Layanan	3	1.262.682.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Tengah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	1.255.558.707	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12.430.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	20.305.000	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	355.205.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	342.573.971	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	895.047.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	892.679.736	

NO					RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan	3	662.125.670	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan	4	749.870.000	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	364.252.680	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	333.690.000	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	98.872.990	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	141.750.000	
6	01	01	2.09	0009							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	194.930.000	
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	199.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	79.500.000	
JUMLAH										49.334.645.795						47.825.110.572	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kabupaten Bogor menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten Bogor lainnya yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian dan pengamatan, atau yang sering diistilahkan dengan penjaringan aspirasi masyarakat, yang kemudian bermuara pada proses input usulan program dan kegiatan melalui Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Proses perencanaan tahunan tidak terlepas dari upaya mengakomodir usulan kebutuhan prioritas masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan Tupoksi. Berdasarkan ketentuan, proses perencanaan tahun 2025 diarahkan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur perencanaan sebagai berikut :

1. Partisipatif, yang terbagi 2 (dua) yaitu melalui kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Bogor di kecamatan dan kabupaten serta Forum Renja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten; dan
2. Politis, yaitu melalui kegiatan penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD melalui Reses di daerah pemilihan dan janji Bupati.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan fokus pembangunan tahunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan dimaksud diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD; dan
3. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Tahap Rancangan Akhir Renja Inspektorat Tahun 2025 sudah dilaksanakannya tahapan pelaksanaan pengumpulan usulan dari seluruh pemangku kepentingan baik melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah maupun usulan melalui Pokok-pokok pikiran DPRD. Oleh karena itu, semua usulan program, kegiatan dan sub kegiatan berasal dari usulan teknokratik yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 untuk menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025. Secara lengkap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

TABEL 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bogor

Nama Perangkat Daerah		: INSPEKTORAT				
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan	Teknokratik
1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	83	Laporan	Teknokratik
1.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	Teknokratik
1.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	436	Laporan	Teknokratik
1.1.5	Pengawasan Desa	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	234	Laporan	Teknokratik
1.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kabupaten Bogor	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	40	Kesepakatan	Teknokratik
1.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	Dokumen	Teknokratik
1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
1.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20	Laporan	Teknokratik
1.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	34	Laporan	Teknokratik
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	Rekomendasi	Teknokratik
2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	13	Rekomendasi	Teknokratik
2.2	Pendampingan dan Asistensi					
2.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	76	PD	Teknokratik
2.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Bogor	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	Teknokratik
2.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24	PD	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Teknokratik
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
6.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
6.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	3	Laporan	Teknokratik
6.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Teknokratik
6.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kel.Tengah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	Teknokratik
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	Orang/Bulan	Teknokratik
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49	Dokumen	Teknokratik
6.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
6.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Teknokratik
6.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	Teknokratik
6.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	Teknokratik
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	Teknokratik
6.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Dokumen	Teknokratik
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel.Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	Paket	Teknokratik
6.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	Dokumen	Teknokratik
6.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel.Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	Orang	Teknokratik
6.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110	Orang	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
6.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
6.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
6.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel.Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
6.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Teknokratik
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Teknokratik
6.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
6.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	unit	Teknokratik
6.6.2	Pengadaan Mebel	Kel.Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	unit	Teknokratik
6.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	Teknokratik
6.6.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	19	unit	Teknokratik
6.6.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	0	unit	Teknokratik
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Teknokratik
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Teknokratik
6.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Teknokratik
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit	Teknokratik
6.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	Teknokratik
6.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	Teknokratik
6.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20	Unit	Teknokratik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam bentuk RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja PD.

Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, memperhatikan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. Sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Bogor, sehingga Inspektorat Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan perumusan, penetapan, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pengawasan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pergantian pemerintahan Republik Indonesia sehingga penyusunan Dokumen RPJMN Tahun baru akan disusun pada Tahun 2025 mendatang. Sehingga Program Prioritas

Nasional yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD/Renja PD Tahun 2025 mengacu kepada Program Prioritas Nasional yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang sudah disusun.

Keterkaitan program Inspektorat Kabupaten Bogor dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 adalah prioritas pembangunan nasional “memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, dimana mendukung sasaran pembangunan nasional yaitu “meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola”.

Agar prioritas pembangunan nasional tersebut dapat dicapai, perlu dukungan program-program dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterkaitan program Inspektorat Kabupaten Bogor dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET			
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	
-								
1	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Pogram Penyelenggaraan Pengawasan	Kesesuaian hasil pengawasan dengan rencana pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	100	%	2.585.798.288	
-		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terfasilitasinya Pelimpahan kegiatan pengawasan dari kementrian/lembaga/non Departemen/APIP lain	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	2	Kebijakan	1.140.125.645	
-					Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	100	%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tugas dan fungsi perangkat daerah terlaksana dengan baik	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%	44.099.186.639	

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Kabupaten Bogor mendukung 1 (satu) prioritas pembangunan nasional, yaitu **Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik** didukung oleh 3 (tiga) program Inspektorat dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Kesesuaian hasil pengawasan dengan rencana pengawasan;
2. Terfasilitasinya Pelimpahan kegiatan pengawasan dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain; dan
3. Tugas dan fungsi perangkat daerah terlaksana dengan baik.

Sementara itu, keterkaitan program dengan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 prioritas pembangunan Jawa Barat adalah : “inovasi pelayanan publik dan penataan daerah” untuk sasaran pembangunan Jawa Barat terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel ke dua poin tersebut berkaitan dengan program pembangunan Kabupaten Bogor yaitu program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi keterkaitan program dengan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	Pogram Penyelenggaraan Pengawasan	Kesesuaian hasil pengawasan dengan rencana pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	100	%	2.585.798.288
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terfasilitasinya Pelimpahan kegiatan pengawasan dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	2	Dokumen	1.140.125.645
				Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	100	%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tugas dan fungsi perangkat daerah terlaksana dengan baik	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%	44.099.186.639

Sejalan dengan arah pembangunan lembaga pusat dimaksud, Inspektorat Kabupaten Bogor turut berperan terhadap proses pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Stabilitas ekonomi daerah;
2. Peningkatan tata kelola pelayanan publik, kinerja aparatur, dan penataan administrasi; dan
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang berkaitan langsung dengan kewenangan Inspektorat Kabupaten Bogor di bidang urusan pengawasan adalah “Peningkatan tata kelola pelayanan publik, kinerja aparatur, dan penataan administrasi”.

Dukungan Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap arah kebijakan nasional, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang baik”, sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat, kegiatan yang mendukung diantaranya:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis pemeriksaan *investigative*, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*), bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.
- b. Kegiatan asistensi/pendampingan yaitu : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- c. Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi, evaluasi SPIP, penilaian

mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan *Whistle Blower System*, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender dan pelayanan publik.

- e. Kegiatan pemeriksaan meliputi : pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.

Untuk Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional digambarkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	BIDANG/SEKSI/SUBID/UPT PENGAMPU
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang baik	Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis pemeriksaan <i>investigative</i> , bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (<i>probity advice</i>), bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.	Urban I,II,III, IV dan V
	Kegiatan asistensi/pendampingan yaitu : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah	Urban I,II,III,dan IV
	Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa.	Urban I,II,III,dan IV
	Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan, Pemeriksa Keuangan,tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi, evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan <i>Whistle Blower System</i> , penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelayanan publik .	Urban I,II,III,IV dan V
	Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.	Urban I,II,III,dan IV

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan perangkat daerah adalah apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahunan, sebagai implementasi dari sasaran daerah. Adapun sasaran perangkat daerah adalah implementasi tujuan tahunan perangkat daerah yang akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan, serta menghasilkan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Demi keselarasan arah pembangunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipandu oleh Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026, dirumuskan tujuan dan sasaran Inspektorat yang akan di capai sampai tahun 2025. Tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Bogor adalah **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**, dengan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Meningkatnya Maturitas Manajemen Resiko;
3. Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
4. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 tercantum dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Sangat Baik	Persentase Perangkat Daerah yang berperingkat nilai BB	25	%
SASARAN	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (O)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Level
	Meningkatnya Maturitas Manajemen Resiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Tingkat Maturitas Resiko (belum dinilai (O)/Level 1/Level 2/Level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Level
	Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level IEPK	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (O)/Level 1/Level 2/Level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2	Level
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Tingkat IEPK (belum dinilai (O)/Level 1/Level 2/Level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Level

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan rancangan akhir rencana kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2025 mempunyai 3 Program, 12 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 3 Program yang terdiri dari 2 Program Utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usulan pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 47.825.110.572,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bogor adalah membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengawasan. Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Eselon II, III dan IV disajikan dalam Tabel 3.5. berikut ini.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
INSPEKTUR	3	12	52	47.825.110.572
SEKRETARIAT	1	8	38	44.099.186.639
Subag Umum dan Kepegawain	1	6	24	5.191.839.948
Subag Keuangan	1	1	6	38.255.436.259
Subag Program dan Pelaporan	1	1	8	651.910.432
IRBAN	2	4	14	3.725.923.933

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026

Rancangan Akhir Rencana kerja Inspektorat Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terbagi menjadi 12 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.825.110.572,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan 5 Inspektorat Pembantu (Itban) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Kabupaten Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan berbeda dengan Perangkat Daerah lain, dimana secara administrasi dan keuangan program utama dilaksanakan oleh sekretariat dan secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Itban. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sasaran program ini adalah “Kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kegiatan” dengan indikator adalah “persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” dimana target yang ingin dicapai sebesar 100%. Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, kegiatan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal; dan
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ; dan
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Sasaran program ini adalah “Tersedianya Kebijakan teknis, dan fasilitasi Pendampingan dan Asistensi pengawasan” dengan indikator adalah “Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan” dimana target yang ingin dicapai sebesar 100% dan indikator kedua yaitu “Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan” dengan target yang ingin dicapai sebanyak 2 dokumen. Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, kegiatan pada program ini adalah:
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan

- 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Sasaran program ini adalah “Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah” dengan indikator adalah “Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah” dengan target sebesar 100%. Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, kegiatan pada program ini adalah:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan RKPD Tahun 2025

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 yang saat ini juga dalam tahap penyusunan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terbagi menjadi 12 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.825.110.572,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan 5 Inspektorat Pembantu (Itban) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Kabupaten Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan berbeda dengan Perangkat Daerah lain, dimana secara administrasi dan keuangan program utama dilaksanakan oleh sekretariat dan secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Itban. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2025 pada tahap Rancangan Akhir ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

URUSAN : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH
 PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
								VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					INSPEKTORAT				47.825.110.572				93.535.691.201
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	%	100	2.585.798.288			100	2.973.668.031
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Dokumen	800	2.205.170.038			841	2.535.945.544
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	113.397.563	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	130.407.197
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	719.581.675	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	83	827.518.926
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	140.558.325	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	161.642.074
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	296.486.600	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	436	340.959.590
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	788.975.250	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	275	907.321.538
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	73.374.075	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40	84.380.186
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	72.796.550	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	83.716.033
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHP yang diterbitkan	Laporan	54	380.628.250			54	437.722.488
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	28.854.000	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20	33.182.100
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	34	351.774.250	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	404.540.388

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA					SATUAN					TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026									
																				VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN								
1					2					3					4					5				6									
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan					Dokumen					2				1.140.125.645		2		1.311.144.492					
										Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan					%					100						100							
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan					Rekomendasi					17				255.112.125				17		293.378.944			
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					Rekomendasi					4				161.431.575		Kab.Bogor		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4		185.646.311	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun					Rekomendasi					13				93.680.550		Kab.Bogor		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13		107.732.633	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi					Jumlah Laporan reviu yang terbit					Laporan					6				885.013.520				6		1.017.765.548			
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					PD					76				53.221.320		Kab.Bogor		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76		61.204.518	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					Kegiatan					4				803.986.950		Kab.Bogor		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4		924.584.993	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					PD					24				27.805.250		Kab.Bogor		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24		31.976.038	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah					%					100				44.174.496.639				100		89.250.878.678			
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi PD					Dokumen					15				651.910.432				14		749.696.997			
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen					3				143.891.625		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3		165.475.369	
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Dokumen					1				25.349.000		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1		29.151.350	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen					1				22.662.675		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1		26.062.076	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Dokumen					1				24.630.550		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1		28.325.133	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen					1				22.911.975		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1		26.348.771	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan					3				58.255.650		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3		66.993.998	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Laporan					4				329.849.807		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4		379.327.278	
6	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Dokumen					1				24.359.150		Kel.Tengah		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1		28.013.023	

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
								VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Laporan	66	38.255.436.259			66	43.993.751.698
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	96	38.024.143.659	Kel.Tengah	Dana Alokasi Umum (DAU)	98	43.727.765.208
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	77.168.625	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49	88.743.919
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	57.548.500	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	66.180.775
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	28.886.450	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	33.219.418
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	43.218.700	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	49.701.505
6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	24.470.325	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	28.140.874
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi barang	Layanan	2	48.786.038			2	56.103.944
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	30.372.657	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	34.928.556
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	18.413.381	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15	21.175.388
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan aparatur terlaksana dengan baik	Layanan	4	1.250.989.586			4	1.438.638.024
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40	11.960.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40	13.754.000
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	113.554.277	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	130.587.419
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	210.000.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21	241.500.000
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	915.475.309	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110	1.052.796.605
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	Layanan	7	656.456.415			7	754.924.877
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33.434.371	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	38.449.527
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	103.323.439	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	118.821.955
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	43.402.300	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	49.912.645
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	41.552.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	47.784.800

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
								VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	152.100.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	174.915.000
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	269.290.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	309.683.500
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.354.305	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	15.357.451
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan pengadaan barang	Layanan	5	1.230.179.202			5	39.976.759.625
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	642.976.380	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	1.042.976.380
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	17	117.657.004	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	135.305.555
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	285.358.440	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	328.162.206
6	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	19	184.187.378	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	211.815.485
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0	75.310.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	38.258.500.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik	Layanan	3	1.255.558.707			5	1.443.892.513
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	20.305.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	23.350.750
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	342.573.971	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	393.960.067
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	892.679.736	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	1.026.581.696
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan	4	749.870.000			4	837.111.000
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	333.690.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32	383.743.500
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	141.750.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72	163.012.500
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	194.930.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	198.930.000
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	20	79.500.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20	91.425.000

BAB V P E N U T U P

Renja Inspektorat tahun 2025 telah berpedoman pada substansi RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, yang merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang Tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Renja Inspektorat Tahun 2025 disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA sampai dengan ditetapkan menjadi DPA Inspektorat Tahun Anggaran 2025.

Untuk selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Renja, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI BOGOR,

